

**LARANGAN – JANGAN MENERBITAN SAMPAI:
28 FEBRUARI 2019 (jam 2000 di Jakarta, Indonesia)**

**INDONESIA MENDUDUKI PERINGKAT KE-62 DARI 126 NEGARA DI INDEKS NEGARA HUKUM; NAIK
EMPAT PERINGKAT**

“The World Justice Project (WJP)” merilis 2019 WJP Indeks Negara Hukum

WASHINGTON, DC (28 Februari 2019) – “The World Justice Project (WJP)” hari ini merilis 2019 WJP Indeks Negara Hukum yang mengukur pelaksanaan negara hukum dalam 126 negara di seluruh dunia. Indeks tersebut berdasarkan dari lebih 120,000 rumah tangga dan 3,800 survei ahli. WJP Indeks Negara Hukum menggunakan data utama and mengukur peraturan negara hukum dalam delapan faktor: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Pemerintahan yang Terbuka, Hak-hak Dasar, Ketertiban dan Keamanan, Penegakan Peraturan, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.

Indonesia yang berada di kedudukan ke-62 daripada 126 negara di seluruh dunia, telah meningkat empat peringkat untuk keseluruhan pelaksanaan negara hukum dalam edisi *WJP Rule of Law Index 2019*. (Harap maklum bahawa perubahan dalam peringkat ini telah dikira dengan membandingkan kedudukan 113 negara yang diukur dalam edisi 2017-2018 Index ini dengan peringkat bagi 113 negara yang sama pada tahun 2019, tidak termasuk 13 negara baharu yang diindeks pada tahun 2019).

Skor Indonesia menempatkannya di kesembilan dari 15 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik* dan ke-9 dari 30 di antara pendapatan menengah ke bawah** negara.

Negara-negara berada di peringkat teratas adalah Denmark (1), Norwegia (2), dan Finlandia (3). Negara-negara berada di peringkat paling bawah adalah Republik Demokratik Congo (124), Kamboja (125), dan Venezuela (126).

Di peringkat antarabangsa, skor *WJP Rule of Law Index* baharu menunjukkan bahawa lebih banyak negara yang telah merosot berbanding meningkat dalam negara hukum secara keseluruhannya bagi tahun kedua berturut-turut, meneruskan penurunan negatif ke arah negara hukum yang semakin lemah di seluruh dunia. Perhatikan tanda-tanda yang menunjukkan peningkatan dalam faham autoritarian, skor faktor untuk “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah” merosot dalam lebih banyak negara daripada mana-mana faktor lain di seluruh dunia sepanjang tahun lalu (61 negara merosot, 23 kekal sama, 29 meningkat).

“Penurunan dalam negara hukum secara umum dan pembatasan kekuasaan pemerintah secara utamanya adalah amat membimbangkan,” ulas Elizabeth Andersen, pengarah eksekutif World Justice Project.

Di peringkat rantau, penunjuk prestasi tertinggi di Asia Timur dan Pasifik adalah New Zealand (tempat ke-8 daripada 126 negara di peringkat antarabangsa), diikuti oleh Australia dan Singapura. Tiga negara dengan skor terendah dalam rantau ialah Filipina, Myanmar, dan Kemboja (tempat ke-125 daripada 126 negara di peringkat antarabangsa).

WJP Indeks Negara Hukum adalah sumber terkemuka di dunia untuk data asli tentang negara hukum dan berdasarkan dari lebih 120.000 rumah tangga dan 3.800 survei ahli. Indeks tersebut memberikan data tentang bagaimana negara hukum dialami dalam kehidupan sehari-hari di negara-negara seluruh dunia. Data berasal dari 44 indikator dalam delapan faktor: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Pemerintahan yang Terbuka, Hak-hak Dasar, Ketertiban dan Keamanan, Penegakan Peraturan, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Setiap faktor adalah dinilai dan diberikan peringkat secara global terhadap regional dan pendapatan data.

"Hukum negara yang efektif adalah landasan bagi masyarakat untuk keadilan, kesempatan dan perdamaian," kata William H. Neukom, pendiri dan CEO WJP. "Tidak ada negara yang mencapai realisasi yang sempurna dalam hukum negara. WJP Indeks Negara Hukum merupakan langkah pertama dalam menetapkan tolok ukur, menginformasikan reformasi, merangsang program, dan memperdalam apresiasi dan pemahaman tentang kepentingan hukum negara."

Data yang lengkap dalam 2019 WJP Indeks Negara Hukum tersedia pada 28 Februari di: www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index

PERINGKAT INDONESIA

WJP 2019 NEGARA HUKUM INDEKS HASIL (1 adalah terbaik)

PERINGKAT INDONESIA SEDUNIA: 62/126

PERINGKAT INDONESIA SEDAERAH*: 9/15

FAKTOR	PERINGKAT SEDAERAH *	PERINGKAT PENDAPATAN**	PERINGKAT SEDUNIA
Pembatasan Kekuasaan Pemerintah	6/15	2/30	29/126
Ketiadaan Korupsi	14/15	16/30	97/126
Pemerintahan yang Terbuka	7/15	5/30	47/126
Hak-hak Dasar	8/15	10/30	82/126
Ketertiban dan Keamanan	12/15	9/30	70/126

Penegakan Peraturan	7/15	2/30	43/126
Hukum Perdata	13/15	20/30	102/126
Hukum Pidana	12/15	15/30	86/126

*Negara-negara diukur di Kawasan Asia Timur dan Pasifik: Australia, Kamboja, China, Hong Kong SAR, China; Indonesia, Jepang, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura, Thailand, Vietnam

** Negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah: Bangladesh, Bolivia, Kamboja, Kamerun, Pantai Gading, Mesir, El Salvador, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Yordania, Kenya, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Maroko, Filipina, Sri Lanka, Tunisia, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Zambia

TENTANG “THE WORLD JUSTICE PROJECT”:

The World Justice Project® (WJP) adalah sebuah organisasi independen, multidisiplin yang mengusahakan kemajuan negara hukum diseluruh dunia. Negara hukum yang efektif mengurangi tingkat korupsi, memberantas kemiskinan dan penyakit, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan dalam skala besar maupun kecil. Hal ini merupakan pondasi untuk terciptanya masyarakat yang damai, menciptakan kesempatan dan kesetaraan—mendukung pembangunan, pemerintah yang bertanggung jawab, dan respek terhadap hak asasi. Untuk infomasi lebih lanjut: www.worldjusticeproject.org

KONTAK MEDIA:

gvinluan@worldjusticeproject.org
(65) 8339-9885